

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran air, terutama yang bersumber dari limbah domestik atau rumah tangga, menjadi isu lingkungan yang serius karena sungai menjadi media akumulasi dan penyebaran limbah pencemar. Sampah plastik merupakan jenis limbah yang paling mengancam ekosistem perairan karena sifatnya yang sulit terurai. Sampah plastik yang masuk ke sungai dan terbawa hingga ke laut berpotensi merusak ekosistem pesisir, mengancam keberlangsungan biota laut, serta mencemari rantai makanan manusia (Primanto & Puspitasari, 2025). Berdasarkan hasil Pemantauan Mutu Air Semester I Tahun 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa 70,7 persen lokasi sungai di Indonesia berada dalam kondisi tercemar, sementara hanya 29,3 persen yang memenuhi baku mutu air (KLHK, 2025). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2024 terdapat 279 Desa/Kelurahan di wilayah Sulawesi Selatan yang terdampak pencemaran air. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan dan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir belum optimal.

Dalam mendukung upaya penanganan dan pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Selatan, komunitas *Marine Plastic Research Group* (MPRG) menginisiasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran air yang disebabkan oleh sampah plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. MPRG merupakan komunitas yang terdiri dari akademisi dan peneliti yang berfokus pada kajian polusi plastik di lingkungan perairan. Melalui *Project Preventing River Bound Plastic Project* atau upaya pencegahan kebocoran sampah plastik dari sungai, MPRG menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dengan menyasar aliran sungai yang mengalami permasalahan pencemaran, khususnya oleh sampah plastik. MPRG melakukan kerja sama dengan *Alliance to End Plastic Waste* (AEPW) yang merupakan sebuah NGO dari Singapura. Organisasi ini kemudian memberikan pendanaan kepada MPRG untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah plastik di laut mulai dari hulu ke hilir.

Salah satu daerah yang menjadi lokasi implementasi program adalah di Kabupaten Pinrang. Pelaksanaan program MPRG di Kabupaten Pinrang berlangsung sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahap awal, tim MPRG melakukan observasi pada Sungai Kariango yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Pinrang dengan panjang sekitar 30,5 km bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Kemudian dilakukan penelusuran aliran sungai dan menetapkan pelaksanaan program di muara sungai yang

berada di Kelurahan Lanrisang. Aliran Sungai Kariango yang melintasi Kelurahan Lanrisang memiliki panjang sekitar 16 km sebelum bermuara ke Selat Makassar. Kondisi geografis Kelurahan Lanrisang yang berada di bagian hilir sungai sekaligus kawasan muara menyebabkan wilayah ini rentan mengalami penumpukan sampah yang terbawa dari daerah hulu melalui aliran Sungai Kariango.

Kegiatan kemudian berlanjut dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perangkat Kelurahan Lanrisang, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lanrisang, dan Masyarakat. Tim MPRG juga mengirimkan mahasiswa KKN Unhas untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat. Bentuk pengabdian ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pengelolaan sampah plastik, praktik pemilahan sampah, upaya menjaga kebersihan sungai dan laut, dan pengenalan alat *Trash Trap*. Pada September 2023, Tim MPRG memasang instalasi *Trash Trap* di badan muara sungai dan membangun Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R).

Pemasangan instalasi *Trash Trap* ditujukan sebagai luaran program yang memerlukan keterlibatan pengelolaan dari masyarakat. *Trash Trap* merupakan alat penangkap sampah yang dipasang di aliran air, seperti sungai atau drainase untuk menahan sampah agar tidak terbawa arus. Alat ini umumnya berbentuk jaring yang dilengkapi dengan pelampung sehingga membentuk penghalang melintang di aliran air. Mekanisme kerja dari alat ini diperlukan operator dan penjadwalan kegiatan untuk mengambil hasil sampah yang tertangkap dan merawat alat yang ada di sungai. Sampah hasil tangkapan kemudian dibawa ke TPS3R untuk diolah dan hasilnya diharapkan dapat terjual.

Program *Trash Trap* dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian ekosistem perairan, dengan keberhasilan yang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat setempat (MPRG, 2024). Untuk meningkatkan keterlibatan warga, MPRG menerapkan skema insentif sebagai upaya mendorong masyarakat dalam memelihara dan mengoperasikan *Trash Trap* secara optimal. Selain itu, program ini diintegrasikan dengan fasilitas pemilahan sampah di tingkat lokal, sehingga sampah yang tertangkap dapat dikelola melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Integrasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran tidak hanya diposisikan sebagai upaya teknis, tetapi juga sebagai pendekatan berbasis masyarakat yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar.

Upaya yang dilakukan oleh Tim MPRG ini searah dengan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.

Peraturan tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara terpadu melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan sampah. Selain itu, peraturan tersebut juga mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Meskipun program *Trash Trap* telah dioperasikan, pada tingkat implementasi masih ditemukan beberapa kendala terutama pada aspek perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat. Temuan penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh Tim Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa 53,3% warga masih membakar sampahnya, 25,7% membuang sampah langsung ke sungai, dan hanya 14% yang menerapkan prinsip 3R, meskipun 68% diantaranya sudah memahami konsep tersebut (Khoolishoh et al., 2024). Dari 105 Kepala Keluarga yang disurvei, hanya 25 yang menyatakan pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dari tim *Trash Trap*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jangkauan sosialisasi dan akses informasi belum merata, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah dari sumbernya masih rendah. Jika situasi ini berlanjut, beban sampah yang masuk ke sungai akan tetap tinggi dan dapat mengurangi efektivitas intervensi.

Selain itu, terdapat tantangan pada rantai pengelolaan pasca-penangkapan yang berpotensi melemahkan capaian program. Berdasarkan data laporan TPS3R Lanrisang dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, volume sampah yang masuk mencapai 184,11 ton per tahun, namun yang berhasil dikelola hanya sekitar 29,07 ton per tahun atau sekitar 15,8%. Kesenjangan antara timbulan yang masuk dan kapasitas pengolahan tersebut menunjukkan bahwa alur kerja *Trash Trap* tidak berhenti pada tahap penangkapan sampah, melainkan berlanjut pada kemampuan fasilitas dan mekanisme kerja dari TPS3R dalam mengolah sampah secara konsisten. Apabila kapasitas pengolahan TPS3R terbatas, jadwal pengangkutan tidak rutin, atau tidak terdapat standar operasional dan sistem kerja yang jelas, maka program berisiko tidak berlanjut. Di sisi lain, ketersediaan informasi publik terkait perkembangan program, capaian pengurangan sampah, serta pelaporan hasil kegiatan juga menentukan akuntabilitas program dan dapat memengaruhi tingkat dukungan masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap keberlangsungan program.

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan, Ketua Tim MPRG mengemukakan bahwa laporan *monitoring* program selalu mengalami kendala sehingga tidak dapat diberikan secara rutin oleh KSM kepada Tim MPRG. Sehingga Ketua Tim MPRG menilai bahwa keberlanjutan dari pelaksanaan

program *Trash Trap* merupakan tanggung jawab dari KSM. Pernyataan ini didukung dalam pedoman teknis pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh KEMENPUPR yang menegaskan bahwa KSM pengelola bersama masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah dibangun bertujuan untuk keberlanjutan program.

Scheirer & Dearing (2011), mendefinisikan keberlanjutan program sebagai kelanjutan dari penggunaan komponen dan aktivitas program yang menghasilkan *output* yang diinginkan bagi masyarakat setelah pendanaan eksternal berakhir. Faktor lain yang juga berpengaruh pada keberlanjutan meliputi kesesuaian program dengan misi organisasi, kekuatan internal yang mendukung program, dan kemampuan organisasi dalam mempertahankan program dengan sumber daya internal atau melalui kemitraan dengan pihak lain. Keberlanjutan ini tidak hanya melibatkan kelanjutan dari aktivitas program yang dijalankan, tetapi juga perlu untuk memastikan bahwa tujuan yang hendak dicapai selama program berlangsung tetap dapat dinikmati oleh masyarakat atau kelompok sasaran.

Sebagai bentuk evaluasi dari salah satu implementasi program *Trash Trap* di Indonesia, penelitian yang berjudul 'Pembangunan Trash Trap Sebagai Pelindung Laut dari Ancaman Sampah Plastik' oleh Aini et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan satu unit *Trash Trap* di muara sungai Pantai Labuhan Haji mampu menghalau sekitar 10 ton sampah dengan melibatkan kolaborasi lintas-aktor (DLHK Provinsi/Kabupaten dan pemerintah desa) serta mendapatkan dukungan operasional berupa pengangkutan terjadwal dan rencana penganggaran desa untuk mengelola alat. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan kesenjangan penting pada aspek keberlanjutan program, yaitu belum kuatnya kelembagaan pengelola lokal akibat rendahnya minat masyarakat setempat dan belum tersedianya pengolahan hasil tangkapan sampah yang dapat menjadi sumber nilai ekonomi atau pendanaan program. Temuan ini relevan bagi penelitian evaluasi keberlanjutan program *Trash Trap* di Lanrisang yang menegaskan bahwa efektivitas intervensi tidak cukup hanya dengan mengukur *output* dari volume sampah. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat tata kelola operasional, kapasitas kelembagaan, integrasi pengelolaan pasca-penangkapan, serta dukungan sumber daya dan akuntabilitas yang menentukan keberlanjutan program.

Penelitian terkait keberlanjutan program juga diteliti oleh Balagaise et al. (2023) yang berjudul 'Analisis Keberlanjutan Pelaksanaan Program Gerbangku di Kabupaten Merauke' dengan menganalisis status keberlanjutan program pembangunan daerah dengan konsep Gerbangku berdasarkan dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi Pendidikan, dimensi sosial-budaya, dimensi kelembagaan, dan dimensi teknologi infrastruktur. Penelitian ini sejalan dengan program *Trash Trap* yang menempatkan keberlanjutan program sebagai isu

utama yang tidak cukup dinilai dari capaian *output*, melainkan perlu dipahami secara multidimensi. Selain itu, penelitian ini memberikan keunggulan pada dimensi kelembagaan dengan atribut sensitif seperti pendampingan atau *mentoring* dan kapasitas lembaga pelaksana yang relevan sebagai rujukan untuk menelaah faktor tata kelola, koordinasi aktor, dan akuntabilitas dalam evaluasi keberlanjutan program *Trash Trap*.

Penelitian (Wicaksono et al., 2025) yang berjudul 'Analisis Keberlanjutan dan Kebermanfaatan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. KAI DAOP 6 Yogyakarta' menganalisis keberlanjutan dan kebermanfaatan program berdasarkan teori *stakeholder* yang dikembangkan oleh Freeman mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasilnya, keberlanjutan program lebih terlihat pada aspek sosial, sementara kebermanfaatan muncul melalui perluasan akses layanan dan dukungan terhadap kesejahteraan komunitas. Dalam konteks evaluasi keberlanjutan program *Trash Trap*, penelitian ini memberikan dukungan pentingnya mengevaluasi program untuk melihat *outcome* dan keberlanjutan, bukan sekedar keberadaan program. Dari sisi partisipasi dan kolaborasi, pelibatan stakeholder secara partisipatif relevan untuk menilai *Trash Trap* melalui keterlibatan aktor lokal, mekanisme komunikasi, dan pembagian peran yang jelas. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan data sekunder, sehingga penelitian program *Trash Trap* dapat mengisi gap melalui penilaian berbasis temuan lapangan terhadap operasional program.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa intervensi pengendalian sampah sungai melalui *Trash Trap* di Kelurahan Lanrisang merupakan program yang tidak hanya menuntut keberhasilan teknis pengumpulan sampah, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola agar manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Keberlanjutan Program *Trash Trap*: Studi Kasus di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang" penting dilakukan untuk menganalisis keberlanjutan program.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjawab rumusan masalah berikut, bagaimana keberlanjutan program *Trash Trap* di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang?

1.3 Tinjauan Teori

Pembangunan berkelanjutan kini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda global yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan upaya pelestarian lingkungan hidup (Suherman et al., 2025). Komitmen ini tertuang dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 melalui pencapaian 17 aspek *Sustainable*

Development Goals (SDGs). Hariram et al. (2023) menegaskan bahwa konsep keberlanjutan tidak hanya menekankan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial namun juga perlu dipahami sebagai sebuah konsep multidimensi dan integrasi berbagai ilmu. Lebih lanjut, tiga pilar keberlanjutan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Keberlanjutan Lingkungan (*Environmental Sustainability*)
Keberlanjutan lingkungan mencakup upaya melindungi, memelihara, dan memulihkan ekosistem alam agar tetap berada dalam batas daya dukung (*carrying capacity*) bumi. Tindakan yang dilakukan tidak hanya berarti konservasi alam secara pasif, tetapi juga mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien, pengurangan limbah dan polusi, transisi menuju energi bersih dan terbarukan, serta perubahan pola produksi dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Keberlanjutan lingkungan menempatkan alam bukan sekedar sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai sistem pendukung kehidupan yang harus dijaga agar generasi mendatang tetap dapat memenuhi kebutuhannya.
- 2) Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*)
Keberlanjutan sosial menekankan aspek kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan kualitas hidup. Pilar sosial mencakup beberapa elemen utama, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar manusia, keadilan dan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hak asasi manusia dan nilai budaya. Pernyataan seperti '*no one left behind*' sangat sesuai untuk menggambarkan konsep ini untuk memastikan bahwa manfaat kebijakan atau program pembangunan dapat dirasakan secara adil, serta menciptakan stabilitas sosial yang menjadi prasyarat bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
- 3) Keberlanjutan Ekonomi (*Economic Sustainability*)
Keberlanjutan ekonomi merupakan sebuah sistem yang mampu menciptakan kesejahteraan jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan memperlebar ketimpangan sosial. Dalam penerapannya, keberlanjutan ekonomi harus diarahkan pada efisiensi penggunaan sumber daya, penciptaan lapangan kerja yang layak, distribusi manfaat ekonomi yang adil, serta pengembangan ekonomi yang mendukung kesejahteraan Masyarakat secara luas.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2021) menerangkan bahwa kegiatan evaluasi berperan dalam membantu para pengambil keputusan dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik bagi kesejahteraan manusia maupun bagi kelestarian

lingkungan. Penilaian evaluatif dilandaskan oleh enam kriteria yaitu, relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Pada aspek keberlanjutan dilakukan penilaian untuk menentukan apakah manfaat dari kegiatan yang dilakukan akan bertahan secara finansial, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberlanjutan suatu program bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan dari interaksi antara faktor lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, politik, dan teknis (Klundert & Anschutz, 2001). Secara konseptual, Klundert & Anschutz menguraikan keberlanjutan program melalui enam aspek utama yaitu:

- 1) Faktor Lingkungan (*Environmental Aspect*)
Keberlanjutan program sangat ditentukan oleh sejauh mana program mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Sebuah program yang secara teknis berjalan tetapi tidak memperbaiki kondisi lingkungan dapat dianggap tidak berkelanjutan.
- 2) Faktor Sosial dan Budaya (*Socio-Cultural Aspect*)
Keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat, program cenderung berhenti meskipun didukung oleh teknologi dan pendanaan.
- 3) Faktor Ekonomi dan Keuangan (*Financial-Economic Aspect*)
Keberlanjutan program juga bergantung pada kelayakan ekonomi dan keuangan seperti sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan. Apabila sebuah program sepenuhnya bergantung pada dana proyek atau donor eksternal, maka program beresiko tidak berlanjut setelah rangkaian proyek berakhir.
- 4) Faktor Kelembagaan dan Organisasi (*Institutional Aspect*)
Faktor kelembagaan berkaitan dengan kapasitas organisasi dan struktur tata kelola yang mengelola program seperti koordinasi antarinstansi, kemampuan organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau program. Kelemahan kelembagaan seringkali menjadi penyebab utama kegagalan program.
- 5) Faktor Politik dan Kebijakan (*Political-Legal Aspect*)
Keberlanjutan program juga ditentukan oleh dukungan kebijakan dan kerangka hukum. Perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan politik tanpa komitmen keberlanjutan dapat menghambat kelangsungan program.
- 6) Faktor Teknis dan Kinerja (*Technical and Performance Aspect*)
Aspek teknis mencakup kesesuaian teknologi dan kinerja operasional program. Pendekatan yang terlalu berorientasi teknologi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan seringkali menyebabkan kegagalan keberlanjutan program.

Scheirer & Dearing (2011) mendefinisikan keberlanjutan dari sebuah program sebagai kelanjutan penggunaan komponen dan aktivitas program yang menghasilkan manfaat atau *output* yang diinginkan bagi masyarakat setelah pendanaan eksternal berakhir. Dalam konteks penelitian ini, teori keberlanjutan dari Scheirer & Dearing digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan penyebab keberlanjutan maupun ketidakberlanjutan program melalui indikator sebagai berikut:

1) Keberlanjutan Manfaat bagi Penerima Program

Indikator ini menilai apakah manfaat atau hasil yang diterima oleh sasaran program (individu atau kelompok) masih tetap berlanjut meskipun pendanaan dari pihak luar telah berhenti. Indikator ini tidak hanya melihat apakah program masih dilaksanakan, tetapi juga apakah dampak positif yang menjadi tujuan program tetap dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Keberlanjutan manfaat dapat tercermin melalui tetap berlangsungnya perubahan perilaku, peningkatan kondisi lingkungan, maupun manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh oleh penerima manfaat sebagai hasil dari implementasi program.

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap manfaat program dapat dilihat apabila program berdampak positif terhadap lingkungan seperti perbaikan kualitas lingkungan sungai dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

2) Keberlanjutan Aktivitas dan Komponen Program

Indikator ini menilai sejauh mana aktivitas dan komponen utama suatu program tetap dilaksanakan setelah dukungan eksternal berakhir. Pengukuran indikator ini tidak hanya berfokus pada keberadaan program secara umum, tetapi juga pada keberlanjutan setiap komponen yang menyusun program. Dengan demikian, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan inti, mekanisme operasional, serta komponen pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan program.

Dalam konteks Program *Trash Trap*, indikator ini digunakan untuk menilai apakah kegiatan seperti pengoperasian dan pemeliharaan *Trash Trap*, pengangkutan serta pengelolaan sampah, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan aktivitas pendukung lainnya masih terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program.

3) Keberlanjutan Kemitraan dan Kolaborasi Komunitas

Indikator ini menilai sejauh mana hubungan kerja sama yang terbentuk selama pelaksanaan program tetap dipertahankan setelah dukungan atau pendanaan eksternal berakhir. Keberlanjutan tidak hanya diukur dari masih berlangsungnya aktivitas program, tetapi

juga dari kemampuan para pemangku kepentingan untuk terus berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Kemitraan yang berkelanjutan menunjukkan adanya kapasitas komunitas untuk mengelola permasalahan secara mandiri serta mengembangkan berbagai inisiatif baru yang mendukung keberlanjutan program.

Dalam konteks Program *Trash Trap*, indikator ini digunakan untuk menilai keberlangsungan hubungan kerja sama antara MPRG, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, kelompok pengelola, dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah sungai dan pesisir secara berkelanjutan.

4) Keberlanjutan Praktik dan Kebijakan Organisasi

Indikator ini menilai sejauh mana perubahan dalam praktik kerja, prosedur operasional, maupun kebijakan yang muncul selama implementasi program tetap dipertahankan oleh organisasi setelah dukungan eksternal berakhir. Keberlanjutan perubahan tersebut menunjukkan bahwa program telah terinstitusionalisasi, yaitu menjadi bagian dari sistem dan tata kelola organisasi. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya melihat keberlangsungan kegiatan program, tetapi juga mengukur apakah organisasi telah mengadopsi cara kerja baru yang mendukung pencapaian tujuan program secara berkelanjutan.

Dalam konteks Program *Trash Trap*, indikator ini digunakan untuk menilai apakah pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, maupun kelompok pengelola telah mempertahankan praktik kerja, prosedur operasional, atau kebijakan yang dibentuk selama pelaksanaan program, seperti pembagian tugas pengelolaan *Trash Trap*, mekanisme koordinasi, jadwal pemeliharaan, prosedur pengangkutan sampah, maupun aturan lain yang mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah sungai.

5) Keberlanjutan Perhatian terhadap Isu Lingkungan

Indikator ini menilai sejauh mana isu yang menjadi fokus program tetap memperoleh perhatian dari masyarakat, organisasi, maupun pemerintah setelah dukungan eksternal berakhir. Keberlanjutan perhatian tersebut tercermin dari masih adanya komitmen berbagai pihak untuk membahas, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya dalam upaya penyelesaian permasalahan yang menjadi sasaran program. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menghasilkan perubahan pada pelaksanaannya, tetapi juga mampu mempertahankan kepedulian dan komitmen terhadap isu yang diangkat dalam jangka panjang.

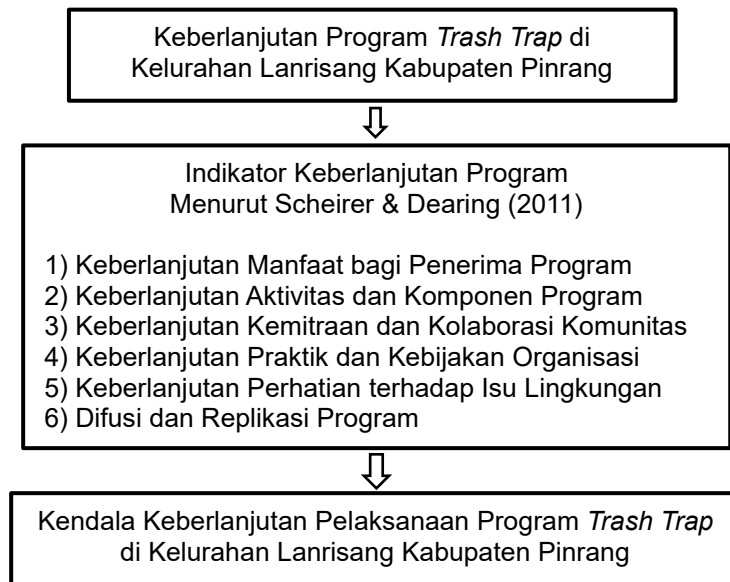
Dalam Program *Trash Trap*, indikator ini digunakan untuk menilai apakah isu pengelolaan sampah sungai dan pencegahan sampah yang bermuara ke laut masih menjadi perhatian masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya setelah berakhirnya pendampingan MPRG. Keberlanjutan perhatian tersebut dapat terlihat dari adanya komitmen untuk terus membahas, mendukung, dan mengembangkan upaya pengelolaan sampah sungai sebagai bagian dari agenda pelestarian lingkungan.

6) Difusi dan Replikasi Program

Indikator ini menilai sejauh mana konsep, inovasi, atau praktik baik yang dikembangkan melalui suatu program disebarluaskan dan diadopsi oleh organisasi atau wilayah lain. Keberlanjutan program dalam indikator ini tidak hanya diukur dari keberlangsungan implementasinya di lokasi awal, tetapi juga dari kemampuannya menjadi model yang dapat diterapkan pada konteks lain. Dengan demikian, keberhasilan program tercermin dari penyebaran inovasi, baik melalui kegiatan diseminasi maupun melalui adopsi dan implementasi oleh pihak lain.

Dalam konteks Program *Trash Trap*, indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana konsep dan praktik pengelolaan sampah sungai melalui *Trash Trap* telah diperkenalkan, dijadikan contoh, atau diadopsi oleh wilayah maupun organisasi lain. Keberlanjutan tidak hanya dilihat dari kelangsungan program di Kelurahan Lanrisang, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menjadi model pembelajaran yang mendorong penerapan inovasi serupa di lokasi lain.

Secara keseluruhan, konsep penilaian keberlanjutan program menurut Scheirer & Dearing (2011) mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Pendekatan teori ini memungkinkan penilaian keberlanjutan program tidak hanya pada efektivitas alat secara teknis, namun juga bergantung pada penguatan dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambaran kerangka berpikir untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai bagaimana interaksi antar faktor menentukan keberlanjutan program *Trash Trap* di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang.



Gambar 1 1 Kerangka Berpikir

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan program *Trash Trap* di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebagai inovasi program di sektor lingkungan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik dan kebijakan lingkungan, khususnya terkait analisis keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai penerapan teori keberlanjutan program dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keberlanjutan program lingkungan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi tim MPRG Unhas dan pengelola lokal dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi program, serta masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, dapat mendorong penguatan partisipasi masyarakat maupun kelembagaan lokal dalam pengelolaan sampah dan menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan program yang berkelanjutan.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell & Creswell (2023:5) merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif menghasilkan data yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan rinci berbasis bukti dengan mempertahankan alur kronologis, melihat keterkaitan peristiwa, dan menghasilkan penjelasan yang bermakna (Miles et al., 2014). Pendekatan ini dipilih karena analisis keberlanjutan program *Trash Trap* tidak hanya menilai capaian hasil akhir, tetapi perlu memahami secara mendalam proses pelaksanaan, pengalaman dan persepsi para *stakeholder*, serta faktor kontekstual yang memengaruhi keberlangsungan program di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan berfokus pada satu kasus spesifik. Studi kasus merupakan desain penelitian yang banyak digunakan di berbagai bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti melakukan telaah mendalam terhadap suatu kasus seperti program, peristiwa, aktivitas, proses, serta satu maupun beberapa individu (Creswell & Creswell, 2023). Dalam konteks penelitian ini, dilakukan dengan penetapan batasan berdasarkan ruang dan waktu (konteks atau latar) terhadap implementasi program *Trash Trap*. Lebih lanjut, peneliti akan melakukan penelusuran mendalam (*in-depth*) terhadap program, aktor, praktik operasional, serta konteks sosial-lingkungan yang memengaruhi keberlanjutan.

2.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan program *Trash Trap* di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah berakhirnya pendanaan program. Analisis dilakukan menggunakan indikator keberlanjutan program menurut Scheirer & Dearing (2011) untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memengaruhi tidak berlanjutnya program *Trash Trap*, aspek yang dinilai dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Keberlanjutan Manfaat bagi Penerima Program
Aspek ini menilai apakah manfaat program masih dirasakan oleh sasaran setelah pendanaan awal berakhir.
- 2) Keberlanjutan Aktivitas dan Komponen Program

Aspek ini menilai apakah kegiatan atau komponen utama program tetap dijalankan. Penilaian tidak hanya dilakukan dengan pertanyaan “program dilanjutkan atau tidak”, tetapi dengan melihat secara lebih rinci komponen mana saja yang masih berjalan dan sejauh mana keberlanjutannya.

3) Keberlanjutan Kemitraan dan Kolaborasi Komunitas

Aspek ini menilai apakah kerja sama atau koalisi yang terbentuk selama pelaksanaan program tetap terjaga setelah pendanaan berakhir.

4) Keberlanjutan Praktik dan Kebijakan Organisasi

Aspek ini menilai apakah praktik kerja, prosedur, atau kebijakan baru yang diperkenalkan selama program berlangsung tetap diterapkan dalam organisasi.

5) Keberlanjutan Perhatian terhadap Isu Lingkungan

Aspek ini menilai apakah perhatian terhadap isu yang diangkat oleh program tetap terjaga. Jika perhatian ini terus dipelihara melalui dukungan organisasi dan pemberitaan media, maka isu tersebut akan tetap dianggap penting oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Dampaknya, pemerintah atau pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian lebih besar serta mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menangani masalah tersebut.

6) Difusi dan Replikasi Program

Aspek ini menilai apakah program atau gagasan yang mendasarinya menyebar dan diterapkan di tempat lain.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023). Penerapannya dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap program *Trash Trap*. Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Informan	Peran	Jumlah
Komunitas <i>Marine Plastic Research Group</i> (MPRG)	Ketua Tim	1 orang
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang	Staff Ahli Bidang Kebersihan	1 orang

Pemerintah Kelurahan Lanrisang	Ketua Lurah Lanrisang	1 orang
Pengelola Lokal atau Penanggung Jawab Operasional Program di Kelurahan Lanrisang	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lanrisang	1 orang
Masyarakat	Masyarakat di Lingkungan Kassie, Jampue, dan Sumpang Saddang	3 orang
Jumlah Informan		7 orang

Tabel 2 1 Informan Penelitian

2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dikembangkan oleh Creswell & Creswell (2023:199) sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi kualitatif merupakan kegiatan peneliti untuk mencermati dan mencatat perilaku serta aktivitas individu di lokasi penelitian. Catatan lapangan dapat dibuat secara tidak terstruktur maupun semi-terstruktur, yakni dengan berpedoman pada beberapa hal atau pertanyaan awal yang ingin ditelusuri oleh peneliti. Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat kondisi aktual di lokasi pemasangan *Trash Trap* seperti aksesibilitas keterjangkauan alat, kondisi lingkungan sekitar, dan sarana pendukung lainnya.

2) Wawancara

Wawancara kualitatif dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, secara tidak langsung melalui telepon atau *platform digital*, serta dengan menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara cenderung tidak terstruktur dan berupa pertanyaan terbuka dengan tujuan memperoleh pandangan, pengalaman, dan opini partisipan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara kepada informan untuk memperoleh data yang mendalam.

3) Studi Dokumen

Selama penelitian, peneliti juga dapat menghimpun dokumen kualitatif yang berupa dokumen publik (misalnya berita, notulen rapat, laporan resmi) maupun dokumen pribadi (misalnya catatan harian, jurnal, surat, dan email). Studi dokumen sangat penting dalam penelitian ini sebagai pelengkap data dari obserasi dan wawancara. Peneliti dapat menelaah laporan program, data pengumpulan sampah, hingga SOP pengelolaan alat.

- 4) Audiovisual, Media Sosial, dan Materi Digital
Data kualitatif juga dapat berupa foto, karya seni atau objek visual, rekaman video, halaman utama situs web, email, pesan teks, unggahan atau teks di media sosial, maupun rekaman suara. Hal ini dapat menjadi data pendukung untuk memastikan keakuratan penelitian yang dilakukan.

2.4.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014) dalam tiga tahapan sebagai berikut:

- 1) Kondensasi Data (*Data Condensation*)
Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah dalam hal ini berupa transkrip wawancara, catatan observasi, maupun dokumen agar menjadi lebih terarah. Penerapannya dilakukan dengan merangkum, memberi kode (*coding*), mengelompokkan kode menjadi kategori, dan menajamkan fokus pada informasi yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian.
- 2) Penyajian Data (*Data Display*)
Setelah data dipadatkan, peneliti kemudian menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan (misalnya matriks, table tematik, bagan alur, peta aktor, atau narasi terstruktur). Penyajian data dapat membantu peneliti dalam melihat pola, perbandingan, hubungan, dan kekosongan data.
- 3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)
Pada tahap ini penarikan kesimpulan disusun berdasarkan makna atau temuan dari pola yang muncul dan perlu diperiksa ulang kebenarannya dengan membandingkan antar sumber (Triangulasi), mencari bukti yang mendukung atau berlawanan, dan menguji konsistensi dengan data observasi dan dokumen. Dalam penelitian ini, pola yang muncul akan menjawab pertanyaan apa yang paling menentukan keberlanjutan, bagaimana hubungan antar faktor, dan apa implikasinya.